



BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

***PROGRESS* PRODUK HUKUM YANG SEDANG PROSES PERSETUJUAN MENTERI PERHUBUNGAN**





BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

PEKERJAAN	JUMLAH PERMOHONAN	BERPROSES
PEMBAHASAN RPP/RPM/RKM	6 Permohonan	6 Permohonan

BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

PEKERJAAN	JUMLAH PERMOHONAN	BERPROSES
PEMBAHASAN RPP/RPM/RKM	16 Permohonan	16 Permohonan

BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA

PEKERJAAN	JUMLAH PERMOHONAN	BERPROSES
PEMBAHASAN RPP/RPM/RKM	13 Permohonan	13 Permohonan

**POSISI PEKERJAAN
BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI DARAT
DAN PERKERETAAPIAN**

PERATURAN TRANSPORTASI DARAT

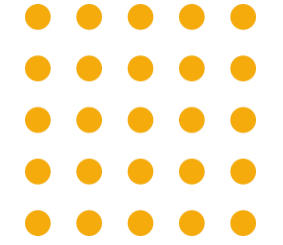
No.	PEKERJAAN	KETERANGAN	TARGET WAKTU
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	RPP Revisi	Target Harmonisasi dilaksanakan pada paling lambat di bulan Desember 2025
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rperpres sebagai tindaklanjut amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021	Pengusulan Rancangan Peraturan Presiden dimaksud dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2026 kepada Kementerian Hukum paling lama September 2025

PERATURAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

No.	PEKERJAAN	KETERANGAN	TARGET WAKTU
1.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Pada Koridor Penghubung dan Bangunan Ekstensi Stasiun Bekasi	Produk hukum terkait dengan pelayanan masyarakat	Dalam hal persyaratan lengkap wajib ditetapkan oleh Menhub
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik	Peraturan teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perkeretaapian.	Target waktu akhir bulan September 2025 sudah ditetapkan
3.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Berupa Stasiun di KM 57+00 – KM 57+400 Antara Stasiun Tenjo - Stasiun Tigaraksa.	Produk hukum terkait dengan pelayanan masyarakat	Dalam hal persyaratan lengkap wajib di tetapkan oleh Menhub
4.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 240 Tahun 2021 Tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.	Peraturan teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perkeretaapian.	Target waktu akhir bulan September 2025 sudah ditetapkan



POSISI PEKERJAAN BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT



BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Satuan Poin Pelanggaran dari Jenis Pelanggaran Administratif di Bidang Transportasi Laut	Tahun 2025	PRIORITAS Direncanakan akan diajukan permohonan pengharmonisasian kepada Kementerian Hukum pada bulan Oktober 2025.
2.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sungai Nyamuk/Sebatik Provinsi Kalimantan Utara	Tahun 2025	PRIORITAS Persyaratan telah lengkap dan terpenuhi, sehingga dapat dilakukan penetapan.

BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
3.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sirombu Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2025	PRIORITAS Persyaratan telah lengkap dan terpenuhi, sehingga dapat dilakukan penetapan.
		Tahun 2025	
4.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tarakan/Malundung Provinsi Kalimantan Utara	Tahun 2025	
		Tahun 2025	
5.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Subi Provinsi Kepulauan Riau	Tahun 2025	
		Tahun 2025	

BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
6.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2025	PRIORITAS Persyaratan telah lengkap dan terpenuhi, sehingga dapat dilakukan penetapan.
7.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Bunyu Provinsi Kalimantan Utara	Tahun 2025	
8.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Susoh Provinsi Aceh	Tahun 2025	

PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
9.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Selat Lampa	Tahun 2025	PRIORITAS Persyaratan telah lengkap dan terpenuhi, sehingga dapat dilakukan penetapan.
10.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Celukan Bawang	Tahun 2025	PRIORITAS Persyaratan telah lengkap dan terpenuhi, sehingga dapat dilakukan penetapan.

PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
11.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Wangi	Tahun 2025	PRIORITAS Persyaratan telah lengkap dan terpenuhi, sehingga dapat dilakukan penetapan.
12.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan BUP PT Bahari Pelabuhan Indonesia untuk Melaksanakan Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bahari Pelabuhan Indonesia di Pelabuhan Dumai Provinsi Riau	Tahun 2025	PRIORITAS Persyaratan telah lengkap dan terpenuhi, sehingga dapat dilakukan penetapan.

PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
13.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan BUP PT Karya Makmur Lestari untuk Melaksanakan Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Karya Makmur Lestari di Pelabuhan Samarinda	Tahun 2025	PRIORITAS Persyaratan telah lengkap dan terpenuhi, sehingga dapat dilakukan penetapan.
14.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan BUP PT Bina Cahaya Timur untuk Melaksanakan Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Bina Cahaya Timur Provinsi Kalimantan Tengah	2025	PRIORITAS Persyaratan telah lengkap dan terpenuhi, sehingga dapat dilakukan penetapan.

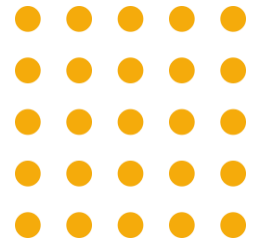
PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
15.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional	Tahun 2025	PRIORITAS Drencanakan akan diajukan permohonan penetapan Rancangan Keputusan Menteri tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional kepada Menteri Perhubungan pada bulan Oktober 2025.
16.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	Bulan Oktober 2025	PRIORITAS Mengingat Revisi PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan telah selesai dilakukan

PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
			harmonisasi pada bulan Desember 2024, dan tidak terdapat materi substansi yang berubah dari hasil harmonisasi dimaksud. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan Kembali terlebih dahulu dengan melibatkan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan BPSDM. Yang Selanjutnya Biro Hukum memproses usulan RPM dimaksud Kembali untuk mohon ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

**POSISI PEKERJAAN
BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA, INTEGRASI
TRANSPORTASI, MULTIMODA & PENUNJANG**



PERATURAN TRANSPORTASI Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda & Penunjang

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
1.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Kepmenhub Nomor KM 78 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Bandar Udara Matahora di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara	2025	Persyaratan telah terpenuhi Kronologis: - Usulan surat Dirjen Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/1/2/DRJU.KUM-2025 tanggal 15 Januari 2025 - Telah dibahas pada tanggal 26 Februari 2025 RKM telah diproses kepada Menteri Perhubungan melalui Surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Perhubungan Nomor HK 203/2/1/SKJ/2025 tanggal 11 Maret 2025. - Disposisi Menteri Perhubungan kepada Dirjen Perhubungan Udara. - Penjelasan Lisan Dirjen Perhubungan Udara melalui surat kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/1/13/DRJU.HKS-2025 tanggal 30 Mei 2025 menyampaikan penjelasan. - Posisi dokumen di Menteri Perhubungan
2.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara APT Pranoto di Provinsi Kalimantan Timur	2025	Persyaratan telah terpenuhi . Kronologis: - Surat usulan Ditjen Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/2/6/DRJU.KUM-2024 tanggal 13 Desember 2024. - RKM telah diproses ke Menteri Perhubungan melalui Surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Perhubungan Nomor HK 203/1/24/SKJ/2025 tanggal 7 MArret 2025. - Disposisi Menteri Perhubungan kepada Dirjen Perhubungan Udara: Penjelasan lisan. - Dirjen Perhubungan Udara melalui surat kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/1/13/DRJU.HKS-2025 tanggal 30 Mei 2025 menyampaikan penjelasan. - Posisi dokumen di Menteri Perhubungan

PERATURAN TRANSPORTASI Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda & Penunjang

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
3.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara Kalimantan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur	2025	Persyaratan telah terpenuhi. Kronologis: - Usulan Dirjen Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan melalui surat Nomor HK.203/1/6/DRJU.KUM-2025 tanggal 20 MAret 2025. - RKM telah diproses melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/2/19/SKJ/2025 tanggal 27 Mei 2025. - Disposisi Menteri Perhubungan terhadap pengajuan RKM tersebut, Dirjen Perhubungan Udara : Penjelasan Lisan. - Terhadap disposisi Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara melalui surat kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/1/13/DRJU.HKS-2025 tanggal 30 Mei 2025 menyampaikan penjelasan. - Menteri Perhubungan meminta penjelasan kepada Ditjen Perhubungan Udara . - Posisi dokumen di Di Bagian Hukum Setditjen Perhubungan Udara
4.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara Syekh Hamzah Fanshuri di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh	2025	Persyaratan telah terpenuhi Kronologis: - Usulan Dirjen Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan melalui surat Nomor HK.202/1/6/DRJU.KUM-2025 tanggal 22 April 2025 - Disposisi Menteri Perhubungan terhadap usulan tersebut, Dirjen Perhubungan Udara : Tanggapan/saran - Terhadap disposisi Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara melalui surat kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/1/13/DRJU.HKS-2025 tanggal 30 Mei 2025 menyampaikan penjelasan - RKM telah diproses melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/2/19/SKJ/2025 tanggal 27 Mei 2025 - Disposisi Menteri Perhubungan terhadap pengajuan RKM tersebut, Sekretaris Jenderal : Beri Penjelasan - Telah diproses penjelasan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/3/1/SKJ/2025 tanggal 20 Juni 2025 - Terhadap penjelasan Sekjretaris Jenderal dimaksud, Menteri Perhubungan mendisposisi ke DJU (berdasarkan info tanggal 13 Agustus 2025) - Menteri Perhubungan meminta penjelasan kepada Ditjen Perhubungan Udara - Posisi dokumen di Direktorat Bandar Udara

PERATURAN TRANSPORTASI Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda & Penunjang

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
5.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara H. Aroeppala di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan	2025	Persyaratan telah terpenuhi. Kronologis: - Usulan Dirjen Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan melalui surat Nomor HK.202/1/5/DRJU.KUM-2025 tanggal 22 April 2025. - Disposisi Menteri Perhubungan terhadap usulan tersebut, Dirjen Perhubungan Udara : Tanggapan/saran. - RKM telah diproses melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/2/25/SKJ/2025 tanggal 5 Juni 2025. - Disposisi Menteri Perhubungan terhadap pengajuan RKM tersebut, Sekretaris Jenderal : Beri Penjelasan Lisan. - Telah diproses penjelasan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/3/2/SKJ/2025 tanggal 20 Juni 2025. - Terhadap penjelasan Sesjen dimaksud, Menteri Perhubungan mendisposisi kembali ke DJU (berdasarkan info tanggal 13 Agustus 2025). - Menteri Perhubungan meminta penjelasan kepada Ditjen Perhubungan Udara . - Posisi dokumen di Direktorat Bandar Udara

PERATURAN TRANSPORTASI Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda & Penunjang

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	5 Oktober 2025 harus sudah diterapkan dalam Sistem OSS	Harmonisasi Bersama dengan Kumham Kronologis: Permohonan persetujuan melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.HK.005/1/SKJ/2025 tanggal 03 September 2025.
7.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Survei Kepuasan Masyarakat	Tahun 2025	Persyaratan telah lengkap dan terpenuhi, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan. Kronologis: - RKM telah diproses melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Perhubungan Nomor HK.203/3/19/SKJ/2025 tanggal 24 Juli 2025. - Disposisi Menteri Perhubungan terhadap pengajuan RKM tersebut, Sekretaris Jenderal : Beri Penjelasan Lisan. - Telah diproses penjelasan kepada Sekretaris Jenderal melalui surat PPTB Nomor UM,006/4/6/PPTTB/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

PERATURAN TRANSPORTASI Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda & Penunjang

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
8	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan	a. Tidak ada ditentukan target waktu dalam peraturan yang lebih tinggi yang mengamanatkan penyusunan RPM ini; b. Berdasarkan surat selesai harmonisasi pada tanggal 27 Agustus 2025 dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 27 September 2025.	Memberikan kepastian hukum dan panduan operasional dalam pelaksanaan tugas khususnya terkait penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja oleh instansi, unit kerja, dan mitra kerja yang terlibat.

PERATURAN TRANSPORTASI Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda & Penunjang

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
9	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Magang bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Tahun 2025	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan. Kronologis: a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro Hukum Nomor 1210/RO.II/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyampaian Draft Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Magang di Lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dimaksud Biro Hukum melaksanakan rapat pembahasan substansi Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan pada tanggal 20 Februari 2025 yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit kerja eselon I (undangan terlampir); c. Menindaklanjuti hasil rapat di Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 12 Maret 2025 dengan mengikutsertakan Lembaga Administrasi Negara sebagai narasumber; d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro Hukum Nomor 214/RO.II/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 hal Penyampaian Kembali Draft Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan; e. Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Magang Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah final kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan

PERATURAN TRANSPORTASI Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda & Penunjang			
No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
10	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pencegahan Penanganan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Terkait Perbuatan Asusila di lingkungan Kementerian Perhubungan	Tahun 2025	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan. Kronologis: - Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro Hukum Nomor 712/RO.II/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 hal Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pencegahan, Penanganan, dan Pembinaan Disiplin Perbuatan Asusila di Lingkungan Kementerian Perhubungan; - Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dimaksud Biro Hukum telah berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terkait materi pengaturan dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pencegahan, Penanganan, dan Pembinaan Disiplin Pegawai Terkait Perbuatan Asusila di Lingkungan Kementerian Perhubungan; - Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pencegahan, Penanganan, dan Pembinaan Disiplin Pegawai Terkait Perbuatan Asusila di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah final kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan
11	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Tahun 2025	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan. Kronologis: - Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro Hukum Nomor 992/RO.II/X/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 hal Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan; - Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dimaksud Biro Hukum melaksanakan rapat pembahasan substansi Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan pada tanggal 8 Januari 2025 yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit kerja eselon I (undangan terlampir); - Menindaklanjuti hasil rapat di Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 12 Maret 2025 dengan mengikutsertakan Lembaga Administrasi Negara sebagai narasumber; - Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro Hukum Nomor 214/RO.II/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 hal Penyampaian Kembali Draft Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan; dan - Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah final kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
12	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan	Tahun 2025	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan.

PERATURAN TRANSPORTASI Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda & Penunjang

No.	DESKRIPSI	TARGET WAKTU	KETERANGAN
13	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 253 Tahun 2022 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, atau Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Mei 2025	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan.
14.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan	2025	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan. Kronologis: a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro Hukum Nomor 992/RO.II/X/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 hal Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dimaksud Biro Hukum melaksanakan rapat pembahasan substansi Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan pada tanggal 8 Januari 2025 yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit kerja eselon I (undangan terlampir); c. Menindaklanjuti hasil rapat di Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 12 Maret 2025 dengan mengikutsertakan Lembaga Administrasi Negara sebagai narasumber; d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro Hukum Nomor 214/RO.II/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 hal Penyampaian Kembali Draft Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan; dan e. Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah final kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan



BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



@Kemenhub151